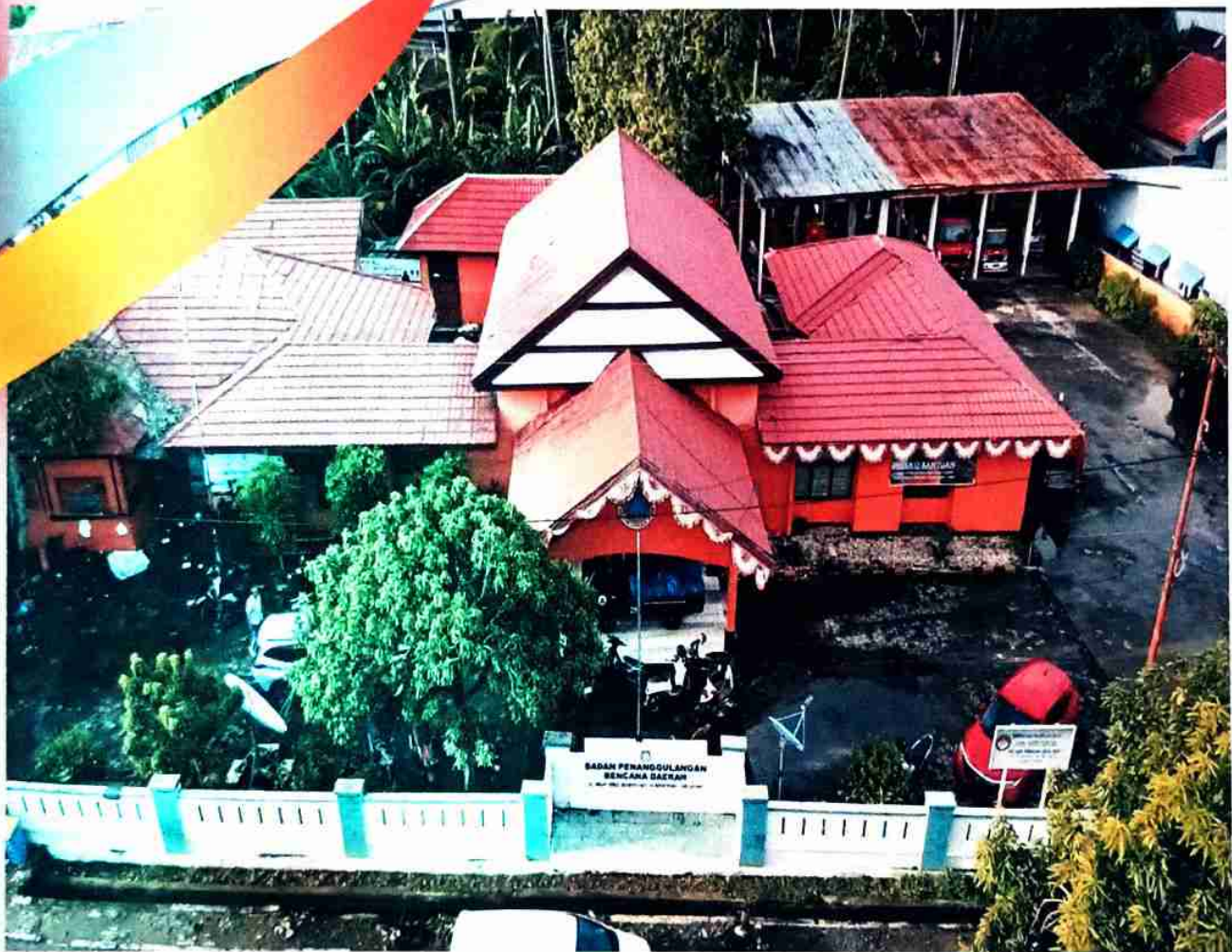




LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah laporan pertanggungjawaban kinerja bagi setiap SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar.

LAKIP ini disusun mengacu pada Pedoman Penyusunan LAKIP sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, sebagai salah satu komponen laporan pertanggungjawaban yang diharapkan dapat menggambarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun anggaran 2024.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami hingga tersusunnya (LAKIP) Tahun 2024, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan datang. Namun kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini.

Demikian LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini disusun dengan harapan dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan LAKIP Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 31 Januari 2025

KEPALA PELAKSANA BPBD,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP 19700726 199101 1 002

ABSTRAK

Ditinjau dari aspek geografis, tofografis maupun demografis, Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan kabupaten dengan tingkat kerawanan bencana yang relatif tinggi. Potensi bencana yang dapat terjadi, antara lain, berupa cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi pantai, banjir, kebakaran hutan & lahan, gempa bumi, kekeringan dan tsunami, kecelakaan laut ataupun bencana non alam dan Sosial lainnya. Diantara berbagai potensi bencana yang ada, yang paling sering terjadi adalah terjangan angin kencang (angin puting beliung, abrasi, gelombang air pasang, dan kecelakaan laut). Kondisi dan dinamika demografis juga dapat menimbulkan bencana yang dapat mengakibatkan kerugian jiwa maupun harta benda. Bencana alam dimaksud telah menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada khususnya maupun pembangunan regional dan nasional pada umumnya. Bencana alam dapat pula menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menjadi beban dan mengganggu jalannya roda pembangunan daerah.

Oleh karena itu, Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan sendirinya harus dikelola dan ditangani secara baik melalui upaya terencana, terpadu dan terkoordinasi antara pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat, dengan memberdayakan semaksimal mungkin potensi sumber daya lokal yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Selayar yang pembentukannya sekaligus dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2008 dan telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 30 Oktober 2010 dengan tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dan sekaligus mempunyai fungsi koordinasi, fungsi komando dan fungsi pelaksana.

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dirumuskan dengan memperhatikan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 yaitu **“Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**,

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi juga merupakan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur.

Pernyataan visi tersebut dilandasi pada tugas pokok dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu :

1. Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang penanggulangan bencana;
2. Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kewenangan pengendalian bencana pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Didalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghadapi beberapa kendala atau tantangan sebagai berikut:

- a. Semakin meningkatnya tuntutan dan kritisnya masyarakat terhadap peningkatan pelayanan pemerintah;
- b. Keadaan geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang sebagian besar wilayah lautan sehingga potensi bencana dapat terjadi di sebagian besar wilayah;
- c. Upaya Mitigasi Bencana yang belum memadai;
- d. Belum adanya masterplan penanggulangan bencana yang menyeluruh;

- e. Masih rendahnya SDM Staf BPBD dalam manajemen penanggulangan bencana ;
- f. Masih kurangnya pemahaman dan kepedulian serta keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

Disamping tantangan yang dihadapi terdapat pula peluang sebagai berikut :

- a. Adanya sistem regulasi yang memadai yang menjadi dasar hukum untuk mendukung kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan canggih yang dapat mendukung peningkatan kualitas penanganan bencana;
- c. Adanya tren peningkatan alokasi anggaran setiap tahun baik itu bersumber dari APBD, APBN (DAK) maupun anggaran dari BNPB;
- d. Adanya kerjasama dengan BMKG dalam mensupport pengadaan alat peringatan dini yang canggih yang berfungsi sebagai alat mitigasi bencana seperti WRS (*Warning Receiver System*) *New Generation*;
- e. Adanya fasilitas *call center* 117 dari BNPB sebagai sarana informasi penerimaan laporan kejadian bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- f. Telah tersusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023-2028;
- g. Memiliki potensi kerjasama dengan beberapa organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan dalam penanganan bencana.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum OPD	3
D. Isu – Isu Strategis	27
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	29
B. Indikator Kinerja Utama	37
C. Rencana Kerja Tahunan	38
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	48
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	50
B. Analisis Capaian Kinerja	53
C. Realisasi Keuangan	56
BAB IV : PENUTUP	70
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
2. Rencana Aksi	
3. Rencana Kerja	
4. Cascading	
5. SKP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab

serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabuapten Kepulauan Selayar diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud laporan ini disusun dengan maksud memberikan gambaran capaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Adapun tujuannya adalah untuk mengukur kinerja Bupati tahun 2024 dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

C. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Dasar Hukum Pembentukan SKPD

- a. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- b. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);

- j. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 142 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2. Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 142 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dan sekaligus mempunyai fungsi pengordinasian, pengkomandoan dan pelaksana dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Pelaksana Badan
- 2) Sekretariat, meliputi :
 - a. Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - c. Subbagian Keuangan
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1) Kepala Pelaksana Badan

Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah

dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Kepala Pelaksana Badan dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Badan meliputi :

- a. Menyusun rencana kerja Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Badan;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
- k. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;

- l. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Pelaksana Badan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana;
- b. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup badan;
- e. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang- undangan badan penanggulangan bencana daerah;
- f. Pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;

- g. Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja badan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - Subbagian Umum, Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
 - Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja.
 - Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

Uraian tugas Sekretaris meliputi :

- ✚ Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ✚ Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- ✚ Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✚ Melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran badan penanggulangan bencana daerah;

- ✦ Melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- ✦ Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- ✦ Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup badan;
- ✦ Melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- ✦ melaksanakan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- ✦ melaksanakan penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan;
- ✦ mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Badan;
- ✦ melaksanakan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan;
- ✦ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- ✦ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✦ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✦ menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✦ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meliputi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ✚ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- ✚ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✚ merumuskan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;

- ✚ melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
- ✚ melaksanakan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana;
- ✚ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- ✚ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✚ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik Dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang kedaruratan dan logistik.

Uraian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik meliputi :

- ✦ menyusun rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✦ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✦ memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- ✦ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah badan;
- ✦ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✦ merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana daerah;
- ✦ melaksanakan tanggap kedaruratan dan logistik;
- ✦ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
- ✦ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✦ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✦ menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala bidang kedaruratan dan logistik dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- dan
- ✦ melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ✚ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- ✚ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✚ merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- ✚ melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- ✚ melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- ✚ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- ✚ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

- ✚ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing masing.

3. LINGKUNGAN STRATEGI

a. Sumber Daya Aparatur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan profesionalisme yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan sebagai pondasi utama dalam upaya untuk mencapai tujuan dimana potensi yang dimilikinya diarahkan untuk merealisasikan Visi dan Misi antara lain :

**1. Jumlah ketersediaan SDM (ASN dan PHL) BPBD
Kab.Kep. Selayar**

Tabel 1.1

Potensi Sumber Daya Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Pangkat / Gol.	Jumlah	Pendidikan	Keterangan
1.	Pembina Utama Muda	1 Orang	S2	Kepala Pelaksana
2.	Pembina Tk. I	1 Orang	S2	Sekretaris
3.	Pembina	2 Orang	S1, S2	Kabid. /Kasubag.
4.	Penata Tk. I	6 Orang	S1, S2	Kabid./Kasubag./ Fungs.Tertentu
5.	Penata Muda Tk. I	3 Orang	S1, S2	Fungs. Pelaksana
6.	Penata Muda	2 Orang	S1, SMA	Fungs. Pelaksana
7.	Pengatur Tk. I	1 Orang	SMA	Fungs. Pelaksana
8.	Pengatur	1 Orang	SMA	Fungs. Pelaksana
9.	P3K/IX	2 Orang	S1	Penata PB Ahli Pertama
10.	-	71 Orang	S1,DII, SMA	Pegawai Harian Lepas (PHL)
	Jumlah	90 orang		

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya aparatur belum cukup memadai dengan total pegawai sebanyak 90 orang, melihat kenyataan yang ada di lapangan masih membutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi/skill yang secara teknis mampu menyikapi persoalan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dinilai semakin kompleks.

2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

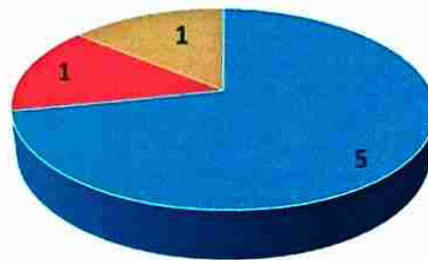
Tabel 1.2

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV/PKP	5 Orang
2	SPAMA/ DIKLATPIM TK. III	1 Orang
3	SPAMEN/DIKLATPIM TK. II	1 Orang
Jumlah		7 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2024.

PELATIHAN PERJEJANGAN PEGAWAI



- ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV/PKP
- SPAMA/DIKLATPIM TK. III
- SPAMEN/DIKLATPIM TK. II

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, menunjukkan bahwa sumber daya aparatur yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan masih 7 orang atau sekitar 60 % dari total pejabat sebanyak 10 orang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

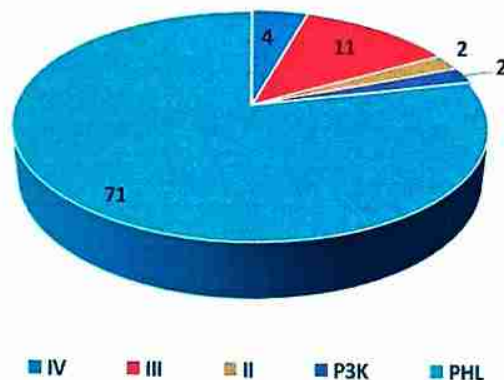
3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV	4 Orang
2	III	11 Orang
3	II	2 Orang
4	P3K	2 Orang
5	PHL	71 Orang
JUMLAH		90 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2024.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Berdasarkan tabel 1.4 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 8 jabatan struktural dengan golongan ruang IV dan III, dan terdapat pula jabatan fungsional tertentu sebanyak 2 orang dengan golongan ruang III, dan golongan ruang II terdapat 2 orang ASN, dan Pekerja Harian Lepas (PHL) sebanyak 71 orang dengan total ASN dan PHL sebanyak 90 orang pada lingkup BPBD Kab.Kep. Selayar.

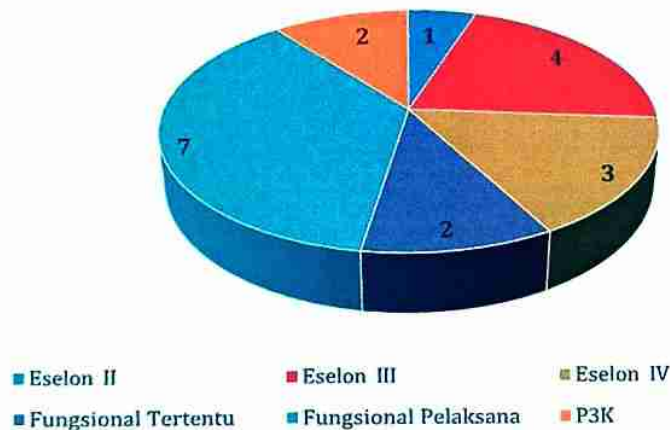
4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon Dan staf

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	4 Orang
3	Eselon IV	3 Orang
4	Fungsional Tertentu	2 Orang
5	Fungsional Pelaksana	7 Orang
6	P3K	2 Orang
Jumlah		19 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2024.

JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN ESELON & STAF



Berdasarkan tabel 1.4 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 1 orang yang menduduki jabatan eselon II sebagai Kepala Pelaksana BPBD, dan terdapat 4 orang yang menduduki jabatan eselon III sebagai Sekretaris dan Kepala Bidang, dan terdapat 3 orang yang menduduki jabatan eselon IV sebagai Kasubag, dan 2 orang dengan jabatan Fungsional Tertentu dan 7 Orang dengan jabatan Fungsional Pelaksana,

dan 2 orang dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sehingga total ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 19 orang.

5. Relawan Bencana

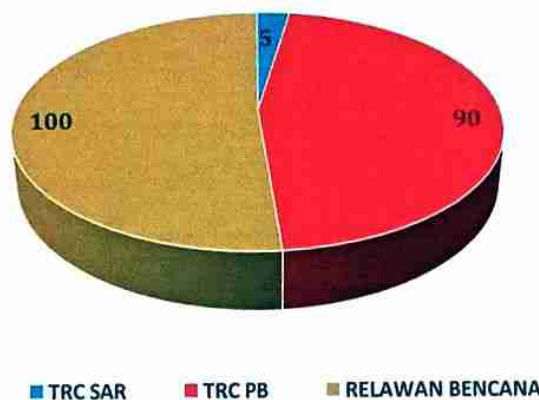
Tabel.1.5

Jumlah Relawan Bencana

No.	Uraian	Jumlah
1	Tim SAR	5 Orang
2	TRC PB	90 Orang
3	Relawan Bencana (RB)	100 Orang
Jumlah		195 Orang

Sumber: BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2024.

JUMLAH RELAWAN BENCANA



Berdasarkan tabel 1.5 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 5 orang sebagai Relawan Tim SAR, dan terdapat 90 orang sebagai relawan TRC PB, dan terdapat 100 orang sebagai relawan bencana desa yang ada di 4 desa dan 1 kelurahan yang telah mengikuti pelatihan mitigasi dan pencegahan bencana.

6. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumberdaya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel. 1.6

Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana
Penanggulangan bencana (kendaraan operasional)

No.	Uraian	Jumlah	Tahun Perolehan	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mobil Dapur Lapangan Izusu NKR BNPB	1 Unit	2011	√		
2	Mobil Rescue Ford RDC STD	1 Unit	2011	√		
	Colt L 300	1 Unit	2018	√		
3	Speed Boat	1 Unit	2009			√
4	Kapal Laut Bermotor	1 Unit	2010			√
	Dolphin	1 unit	2015			√
	Politilene	2 unit	2016			√
5	Motor Lapangan Trail	2 Unit	2011	√		
	Kawasaki LX	2 unit	2016			
6	Motor Dinas lainnya	20 Unit	2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017	√		
	JUMLAH	32 Unit		28	0	4

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2024.

Berdasarkan tabel 1.6 di atas, menjelaskan jumlah aset yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar berupa kendaraan operasional, dapat dilihat terdapat 32 unit kendaraan

operasional, dari total tersebut 31 unit aset dengan kondisi baik dengan persentase 87,5 %, dan terdapat aset dengan kondisi rusak berat sebanyak 4 unit dengan persentase 12,5 %, dan tidak terdapat aset dengan kondisi rusak ringan dengan persentase 0 %. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan aset di lingkungan BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun berikutnya.

7. Peralatan Kebencanaan

Tabel. 1.7

Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana
Penanggulangan bencana (peralatan kebencanaan)

No	Uraian	Jumlah		Keterangan	Kondisi		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mobil Rescue	1	Unit		√		
2	Mobil Operasional	1	Unit		√		
3	Mobil Dapur Umum Lapangan	1	Unit		√		
4	Motor Trail	4	Unit		√		
5	Speed Boat	1	Unit				√
6	Perahu Karet Politiline	1	Unit				√
7	Mesin Penyedot Air	4	Buah	1 Baik 3 Rusak	√		√
8	Chaisaw	18	Unit	13 Baik 5 Rusak	√		√
9	Tangga	2	Buah		√		
10	Genset	2	Buah		√		
11	Kantong Mayat	9	Lembar		√		
12	Perlengkapan Bayi	21	Paket		√		
13	Logistik Pangan	11	Paket		√		
14	Logistik Perlengkapan Keluarga	11	Paket		√		
15	Shelter Kit	8	Paket		√		
16	Matras BNPB	334	Lembar		√		
17	Selimut BNPB	334	Lembar		√		

18	Family Kit BNPB	5	Paket		√		
19	Kidsware BNPB	5	Paket		√		
20	Hand Sanitizer BNPB	6	Jeri gen		√		
21	Rompi Pelampung	10	Unit		√		
22	Sabun Cair	24	Botol		√		
23	Sabun Nuvo	720	Dos		√		
24	Masker Kain	1.400	Pcs		√		
25	Masker Medis	2.000	Pcs		√		
26	APD (alat pelindung diri)	140	Pcs		√		
27	Ember	15	Buah		√		
28	Jerigen	20	Buah		√		

Sumber : Data Inventaris Peralatan pada Bidang kedaruratan & Logistik BPBD Kab. Kep. Selayar Tahun 2024.

Sarana dan prasarana ini digunakan dalam kondisi tertentu, yang dapat dimobilisasikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam berbagai skala baik lokal, regional maupun nasional. Dengan demikian BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan sarana dan prasarana ini secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan daerah dalam menangani bencana.

b. Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka dalam tahun 2024 tersedia anggaran sebesar Rp.4.581.062.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.8

Program kegiatan keuangan tahun 2024

No.	JENIS BELANJA	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang & Jasa - Belanja Modal			4.581.062.000,- 2.048.862.000,- 2.459.182.000,- 73.018.000,-
		A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. /Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA – SKPD - Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA – SKPD - Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA – SKPD - Koordinasi dan	51.832.000,- 7.900.000,- 5.872.000,- 5.872.000,- 5.872.000,- 5.872.000,-

			penyusunan dokumen Perubahan DPA – SKPD	
			- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.750.000,-
			- Evaluasi kinerja perangkat daerah	12.694.000,-
			2. Administrasi keuangan perangkat daerah	2.070.512.000,-
			- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.048.862.000,-
			- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	14.342.000,-
			- Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	7.308.000,-
			3. Administrasi Barang milik Daerah pada perangkat daerah	5.000.000,-
			- Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	5.000.000,-
			4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	123.706.000,-
			- Pendidikan dan	123.706.000,-

			pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	
			5. Administrasi umum perangkat daerah	494.487.200,-
			- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	6.401.000,-
			- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.032.700,-
			- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	5.000.000,-
			- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	467.053.500,-
			6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	77.518.000,-
			- Pengadaan Mebel	44.018.000,-
			- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	30.500.000,-

			7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor	449.517.100,- 111.020.000,- 338.497.100,-
			8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak perizinan kendaraan dinas opsional atau lapangan - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya - Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	268.610.400,- 40.130.000,- 137.870.000,- 31.030.000,- 59.580.400,-



		B. Program penanggulangan bencana	1. Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	90.985.000,-
			- Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten / kota	90.985.000,-

			2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	294.009.000,-
			- Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	102.655.000,-
			- Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten /kota	35.000.000,-
			- Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	156.354.000,-
			3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	367.885.000,-
			- Respon cepat darurat bencana	10.000.000,-

			kabupaten/kota - Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat bencana Kabupaten/Kota	37.490.000,- 98.456.000,- 221.939.300,-
			4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan - Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota	290.000.000,- 40.000.000,- 250.000.000,-

C. Isu – isu Strategis

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan BPBD sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu:

1. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur bidang penanggulangan bencana, dalam hal ini masih kurangnya tenaga Tim Reaksi Cepat (TRC) yang terlatih dan kompeten dibidang kebencanaan;
2. Belum Optimalnya sistem pendataan/informasi kebencanaan dikarenakan belum terlaksananya penggunaan *call center* 117 BPBD;
3. Alokasi anggaran yang belum memadai dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi bidang kebencanaan, ini disebabkan masih kurangnya kompetensi/skill SDM BPBD yang mumpuni dalam pengoperasian peralatan teknologi informasi kebencanaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1) Faktor Internal :

1. Keterbatasan kualitas/kompetensi sumber daya aparatur penanggulangan bencana;
2. Masih kurangnya Tim Reaksi Cepat (TRC) yang ditingkatkan kapasitasnya;
3. Sarana dan prasarana belum memadai.

2) Faktor Eksternal :

1. Kurangnya alokasi anggaran yang memadai dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Belum maksimalnya kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Seiring dengan estafet kepemimpinan Bupati di Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 17 Februari 2016, maka Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi , misi , dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional . (*Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang " Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 "*).

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Penanggulangan Bencana, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dan merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, maka secara sinergi pula Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) 2021 - 2026. Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada masa yang akan datang serta dengan memperhitungkan faktor-faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta stakeholder lainnya, maka dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 dicanangkan Visi Kabupaten Kepulauan Selayar

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke

Program Pembangunan Daerah. Program prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT);
dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Untuk mengantar pada penajaman Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, berikut dijelaskan pendekatan pembangunan wilayah yang akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu :
 - a. Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng.
 - b. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
 - c. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
 - d. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
 - e. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata Kecamatan Bontomatene, berupa :

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
- b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
- c. Terbangunnya fasilitas pergudangan dan penumpang.
- d. Tersedianya kapal pengangkut barang dan penumpang.

Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan 2.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi – Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu :

- a. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang.

- b. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya.
- c. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang.
- d. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang.
- e. Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi.
- f. Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi.
- g. Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi-Gusung Kecamatan Bontoharu, berupa :

- a. Terbentuknya kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata.
 - b. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
 - c. Dimulainya pembangunan fasilitas hunian.
 - d. Dimulainya pembangunan pelabuhan pariwisata.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu :
- a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang.
 - b. Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
 - c. Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
 - d. Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
 - e. Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang Kecamatan Bontosikuyu, berupa

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
 - b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
 - c. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
 - d. Dimulainya pembangunan pelabuhan perikanan.
 - e. Dimulainya pembangunan fasilitas industri.
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbagsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan

yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbagsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan OPD yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbagsari. Sebagai indikator capaian dari program Gerbagsari ini diantaranya meningkatnya penyediaan lapangan kerja, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya kesehatan lingkungan permukiman.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan;
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan;
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut

akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi.

sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, maka ditetapkan Tujuan Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian berdasarkan tujuan pembangunan BPBD tersebut, maka disusun sasaran strategis BPBD, adapun yang menjadi tujuan dan sasaran BPBD selama lima tahun 2021-2026 adalah :

MISI 1

Tujuan 1 :

- Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan SPM.

Sasaran :

- ❖ Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan 2 :

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sasaran :

- ❖ Meningkatnya nilai SAKIP.

Tujuan 3 :

- Meningkatkan tertib pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah.

Sasaran :

- ❖ Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

MISI 3**Tujuan :**

- Mewujudkan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

Sasaran :

- ❖ Meningkatnya kualitas pelayanan kebencanaan.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada tahun ke-						Kondisi kinerja pada akhir Periode RPJMD
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	27,36	32,30	34,24	36,18	38,15	38,15
		Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan BPBD	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	N/A	76,9	77	77,5	78	78,5	78,5
			Nilai Sakip OPD	55,85 (CC)	60,00 (B)	65,00 (B)	70,00 (BB)	75,00 (BB)	80,00 (BB)	80,00 (BB)
			Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya kualitas pelayanan kebencanaan	Persentase layanan pengurangan risiko bencana pada masyarakat	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %
		Persentase korban bencana yang tertangani	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %
		Persentase penanganan pasca bencana	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN /FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kebencanaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	(Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana / seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana) X 100%	Laporan kegiatan
2.		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah SDM/warga negara di daerah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana/ seluruh penduduk di kawasan rawan bencana} X 100 %	Laporan kegiatan
3.		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	(Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan di evakuasi / Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana) X 100%	Laporan kegiatan

C. Rencana Kerja Tahunan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka ditetapkan Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA – SKPD

- c. Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA – SKPD
- d. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA – SKPD
- e. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA – SKPD
- f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- g. Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi keuangan perangkat daerah
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
 - c. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
3. Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah
 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pasa SKPD
4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
5. Administrasi umum perangkat daerah
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
 - d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor
8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- B. Program penanggulangan bencana
- 1. Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten / kota
 - a. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten / kota.
 - 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - a. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - b. Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten / kota
 - c. Pengelolaan risiko bencana kabupaten / kota
 - 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - 2. Respon cepat darurat bencana kabupaten / kota
 - 3. Pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten / kota
 - 4. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten / kota
 - 5. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 - 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - a. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
 - b. Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota

📌 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Dalam upaya pencapaian target pada Rencana Strategis Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan 2 Program dengan 12 kegiatan dan 34 sub kegiatan.

Penetapan Kinerja bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian/ Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.3

Perjanjian/Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan bencana Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan aparatur di bidang penanggulangan bencana	Persentase capaian kinerja		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.538.182.700,-
		Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 51.832.000,-
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Rp. 7.900.000,-
		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 5.872.000,-
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 5.872.000,-

		RKA-SKPD			
		Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp. 5.872.000,-
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp. 5.872.000,-
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 7.750.000,-
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 laporan	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 12.694.000,-
		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.070.512.000,-
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp. 2.048.862.000,-
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi	1 Laporan	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 14.342.000,-



		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
		Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 Dokumen	3. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan	Rp. 7.308.000,-
		Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		C. Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 5.000.000,-
		Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1 Penatausahaan barang milik daerah	Rp. 5.000.000,-
		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 123.706.000,-
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	7 orang	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 123.706.000,-
		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		E. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 494.487.200,-
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 6.401.000,-
		Jumlah paket barang cetakan	1 paket	2 Penyediaan barang cetakan	Rp. 16.032.700,-



		dan pengadaan yang disediakan		dan pengadaan	
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen	3 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 5.000.000,-
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	4 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 467.053.500,-
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 74.518.000,-
		Jumlah paket mebel yang disediakan	40 unit	1. Pengadaan mebel	Rp. 44.018.000,-
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	2. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp. 30.500.000,-
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah		G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 449.517.100,-
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 111.020.000,-
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp. 338.497.100,-
		Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah		H. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 268.610.400,-
		Jumlah	1 unit	1. Penyediaan jasa	Rp. 40.130.000,-

		kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
		Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	23 unit	2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp. 137.870.000,-
		Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	20 unit	3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp. 31.030.000,-
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 unit	4. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp. 59.580.400,-
2.	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp. 1.042.879.300,-

		dan evakuasi korban bencana			
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 90.985.000,-
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 tahun	100 orang	2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Rp. 90.985.000,-
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Rp. 294.009.000,-
		Jumlah kawasan yang ditingkatnya kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2 Kawasan	1. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Rp. 102.655.000,-

		Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	5 orang	2. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Rp. 35.000.000,-
		Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	3. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 156.354.000,-
		Persentase warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		C. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 367.885.300,-
		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	1 dokumen	1. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Rp. 10.000.000,-
		Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	30 orang	2. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/ Kota	Rp. 37.490.000,-
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan	30 orang	3. Penyediaan logistik penyelamatan	Rp. 98.456.000,-

		distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana		dan evakuasi korban bencana Kabupaten/ Kota	
		Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana Kabupaten/Kota	1 laporan	4. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Rp. 221.939.300,-
		Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan an Bencana		D. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp. 290.000.000,-
		Jumlah data dan informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1. Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Rp. 40.000.000,-
		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana disemua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Kabupaten yang dilegalkan	1 Kegiatan	2. Koordinasi penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Rp. 250.000.000,-
JUMLAH					Rp. 4.581.062.000,-

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau

kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. MUH. BASLI ALI
Jabatan : Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,


H. MUH. BASLI ALI

Pihak Kesatu,


Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

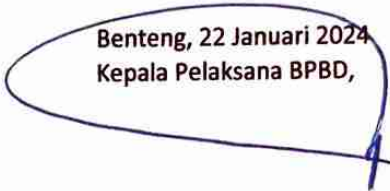
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kebencanaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi	100%
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.322.976.400	
2.	Program Penanggulangan Bencana	750.000.000	

Bupati Kepulauan Selayar,


H. MUH. ALI BASLI

Benteng, 22 Januari 2024
Kepala Pelaksana BPBD,


Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja PD	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	1. Penyusunan Renja dan Revisi Renstra	Rp 7.900.000	Dokumen	Tersedianya Dokumen Renja dan Renstra Perubahan
		2.	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp 5.872.000	Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA pokok
		3.	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp 5.872.000	Dokumen	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD
		4.	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Rp 5.872.000	Dokumen	Tersedianya Dokumen DPA pokok
		5.	5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Rp 5.872.000	Dokumen	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD
		6.	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) SKPD	Rp 7.750.000	Laporan	Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan selama 1 (satu) tahun
		7.	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7. Penyusunan Laporan LAKIP, LKIP, LPPD dan SPM	Rp 12.694.000	Laporan	Tersedianya Laporan LAKIP, LKIP, LPPD dan SPM
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.	8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun	Rp 1.840.776.400	Dokumen	Tersedianya gaji dan Tunjangan bagi ASN selama satu Tahun
		9.	9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas laporan keuangan)	Rp 14.342.000	Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
			10. Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10. Pengelolaan dan penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BPK dan Inspektorat	Rp 7.308.000	Dokumen	Tersedianya Dokumen Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		11. Penyediaan Laporan aset milik Daerah SKPD	Rp 5.000.000	Laporan	Tersedianya Laporan Aset SKPD
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		12. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan bimtek berdasarkan tugas dan fungsi	Rp 124.756.000	Laporan	Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan diklat dan bimtek pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
				Penyediaan laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Kenaikan Gaji Berkala		Laporan	Tersedianya laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Kenaikan Gaji Berkala
				13. Fasilitas Kenaikan Pangkat Pegawai ASN		Laporan	Tersedianya laporan Kenaikan Pangkat Pegawai ASN
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		14. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (alat-alat yang berhubungan dengan listrik)	Rp 6.401.000	Dokumen	Tersedianya Komponen alat listrik yang terpasang
		14. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		15. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan untuk keperluan kantor seperti baliho, spanduk, banner dll)	Rp 10.423.800	Dokumen	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
		15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		16. Penyediaan surat kabar	Rp 5.000.000	Dokumen	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
		16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		17. Pelaksanaan rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Rp 386.289.500	Laporan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.	Pengadaan Mebel	18.	Rp 87.164.000	Dokumen	Tersedianya meubeler kursi rapat
				19.	Rp 36.500.000	Dokumen	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya.
				20.	Rp -	Laporan	Tersedianya jasa surat menyurat
				21.	Rp 134.100.000	Laporan	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				22.	Rp 373.770.700	Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.	Penyediaan jasa surat menyurat	23.	Rp -	Laporan	
				24.	Rp 40.130.000	Dokumen	Terlaksananya pemeliharaan 1 Unit mobil Jabatan
				25.	Rp 138.090.000	Dokumen	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 23 unit
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.	Rp -	Laporan	
				24.	Rp 40.130.000	Dokumen	Terlaksananya pemeliharaan 1 Unit mobil Jabatan
				25.	Rp 138.090.000	Dokumen	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 23 unit

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
2.	Program Penanggulangan Bencana	9. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	24.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp 31.030.000	Dokumen	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			25.	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 30.063.000	Dokumen	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
			26.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE) Rawan Bencana Kabupaten Kota (Perjenis Bencana)	Rp 100.000.000	Laporan	Terlaksananya Sosialisasi Mitigasi Bencana di 5 Kawasan
			27.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rp 100.000.000	Laporan	
			28.	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000	Laporan	Tertanganinya pohon yang berpotensi menimbulkan bencana/ pohon tumbang
			29.				
			30.				
			31.				
			32.				
			33.				
			29.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Rp 35.000.000	Laporan	Tersedianya SDM Tim Reaksi Cepat (TRC)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
		11 Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	30. Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	34. Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 45.000.000	Laporan	Tersedianya Laporan Pertolongan dan Evakuasi Korban bencana
		31. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	35. Pertolongan dan Evakuasi korban bencana	35. Fasilitas pemberian bantuan logistik dan peralatan	Rp 75.000.000	Laporan	Tersedianya Laporan Pemberian Bantuan Logistik dan Peralatan
		32. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	36. Pertolongan dan Evakuasi korban bencana	36. Koordinasi dengan dinas terkait penanganan bencana	Rp 155.000.000	Laporan	Terlaksananya Laporan Koordinasi dengan Instansi terkait penanganan Bencana
		33. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	37. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	37. Pertolongan dan Evakuasi korban bencana	Rp 40.000.000	Laporan	Tersedianya Laporan PUSDALOPS
		34. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	38. Pemberian bantuan material bangunan untuk perbaikan rumah korban bencana (angin kencang, tertimpa pohon, kebakaran dll)	38. Pengelolaan PUSDALOPS-PB (Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana)	Rp 100.000.000	Laporan	Tersedianya Laporan Penanganan Pascabencana
			40. Monitoring dan Evaluasi penanganan pasca bencana	40. Monitoring dan Evaluasi penanganan pasca bencana			
			41. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	41. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi			
TOTAL					Rp 4.072.976.400		

Benteng, 22 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA BBPD,

Drs. AHMAD ALIEFYANNO, M.M.Pub.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19700726 199101 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PATTA BAU, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub

Pihak Pertama,

PATTA BAU, S.Sos., M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja PD	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	1. Penyusunan Renja	Rp 7.900.000	Dokumen
				2. Revisi Renstra		Dokumen
			2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3. Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp 5.872.000	Dokumen
			3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4. Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp 5.872.000	Dokumen
			4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5. Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Rp 5.872.000	Dokumen
			5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6. Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Rp 5.872.000	Dokumen
			6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) SKPD	Rp 7.750.000	Laporan
			7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8. Pelaksanaan penyusunan dokumen LAKIP	Rp 12.694.000	Laporan
				9. Pelaksanaan penyusunan dokumen LKPJ		Dokumen
				10. Pelaksanaan penyusunan dokumen LPPD		Dokumen
				11. Pelaksanaan penyusunan dokumen SPM Per Triwulan		Dokumen
			8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun	Rp 1.840.776.400	Dokumen
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
				9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 14.342.000	Laporan
				10. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 7.308.000	Dokumen
				11. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Rp 5.000.000	Laporan
				12. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 124.756.000	Laporan
				13. Penyediaan laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Kenaikan Gaji Berkala		Laporan
				14. Fasilitas Kenaikan Pangkat Pegawai ASN		Laporan
				15. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (alat-alat yang berhubungan dengan listrik)	Rp 6.401.000	Dokumen
				16. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan untuk keperluan kantor seperti baliho, spanduk, banner dll)	Rp 10.423.800	Dokumen
				17. Penyediaan surat kabar	Rp 5.000.000	Dokumen
				18. Pelaksanaan rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Rp 386.289.500	Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.	Pengadaan Mebel	23.	Rp 87.164.000	Dokumen
				24.	Rp 36.500.000	Dokumen
				25.	Rp	Laporan
				26.	Rp 134.100.000	Laporan
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.	Rp 373.770.700	Laporan
				28.		Laporan
				29.	Rp 40.130.000	Dokumen
				30.	Rp 138.090.000	Dokumen
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.	Penyediaan jasa surat menyurat	31.	Rp 31.030.000	Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
			25. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32. Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor	Rp 30.063.000	Dokumen
TOTAL					Rp 3.322.976.400	

Benteng, 22 Januari 2024

SEKRETARIS BADAN,

PATTI BAU, S.Sos., M.Si.
NIP. 19760611 200502 1 010

KEPALA PELAKSANA BPBD,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, MM.Pub.
NIP : 19700726 199101 1 002

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
SEKRETARIS BADAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
SUB KEGIATAN				: PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	1. Memaraf SK Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Renja OPD	Rp 7.900.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

SUB KEGIATAN		: KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD															
3. Penyusunan Dokumen RKA SKPD		1. Memaraf SK Pembentukan tim Penyusun Dokumen RKA	Rp	5.872.000													
		2. Menghadiri rapat dengan tim anggaran DPRD															
		3. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk menginstruksikan pejabat yang membidangi perencanaan untuk melakukan koordinasi PPAS di bagian Anggaran BPKPD															
		4. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk menginstruksikan pejabat yang membidangi untuk Menyusun/menginput RKA Pokok pada Aplikasi SIPD															
		5. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk menugaskan PPTK untuk melakukan asistensi RKA yang dilaksanakan oleh BPKPD															
		6. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk menginstruksikan PPTK untuk melakukan revisi hasil asistensi RKA pokok pada aplikasi SIPD															
		7. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk menugaskan PPTK untuk melakukan reviu RKA yang dilaksanakan Inspektorat Daerah															
		8. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk menginstruksikan PPTK untuk melakukan revisi RKA hasil reviu pada aplikasi SIPD															
		9. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk menginstruksikan kepada pejabat yang membidangi perencanaan untuk membawa dokumen DPA ke tim TAPD untuk selanjutnya ditandatangani															
		10. Dokumen RKA Pokok															

SUB KEGIATAN		: KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA SKPD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4.	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKAP) SKPD	1.	Memaraf SK Pembentukan tim Penyusun Dokumen RKA Perubahan	Rp	5.872.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

SUB KEGIATAN		: KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA SKPD														
6. Penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD	1. Memaraf SK Pembentukan tim Penyusunan Dokumen DPA Perubahan	Rp	5.872.000													
	2. Menghadiri rapat dengan tim anggaran DPRD															
	3. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengarahkan pejabat yang membidangi perencanaan untuk melakukan koordinasi PPAS di bagian Anggaran BPKPD															
	4. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan pejabat yang membidangi perencanaan untuk menyusun rencana kegiatan dari PPTK berdasarkan pagu anggaran dari keuangan (BPKPD)															
	5. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada PPTK untuk melakukan penginputan usulan kegiatan di aplikasi SIPD															
	6. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada PPTK untuk melakukan asistensi DPA Perubahan di TAPD															
	7. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada PPTK untuk melakukan revidi DPA Perubahan di Inspektoran															
	8. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada PPTK untuk melakukan perbaikan rencana kegiatan															
	9. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kembali kepada PPTK untuk melakukan revidi ulang setelah melakukan perbaikan															
	10. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi perencanaan untuk membawa dokumen DPA Perubahan ke tim TAPD untuk selanjutnya															
	11. Dokumen DPA Perubahan															

SUB KEGIATAN		: KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD															
7.	Penyusunan Laporan Realisasi fisik dan Keuangan (RFK)	1. Memaraf SK Pembentukan tim penyusun laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) SKPD	Rp	7.750.000													
		2. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan pejabat yang membidangi keuangan untuk mengumpulkan dokumen terkait realisasi dan penyerapan anggaran SKPD															
		3. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi keuangan untuk menyusun laporan capaian kinerja SKPD															
		4. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi keuangan untuk menyampaikan dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD ke Bagian Pembangunan Setda, Bappelitbangda dan BPKPD															
SUB KEGIATAN		: EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH															
8.	Pelaksanaan Penyusunan dokumen LAKIP	1. Memaraf SK Pembentukan tim Penyusun Dokumen LAKIP	Rp	12.694.000													
		2. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi perencanaan untuk mengumpulkan data internal/eksternal untuk penyusunan LAKIP															
		3. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi perencanaan untuk menyusun rekapitulasi anggaran															
		4. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi perencanaan untuk melakukan pengukuran kinerja															
		5. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi perencanaan untuk melakukan evaluasi kinerja															

SUB KEGIATAN		: PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN												
12.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi keuangan untuk menyiapkan SPP dan SPM Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.840.776.400											
		2. Memverifikasi berkas SPP dan SPM beserta kelengkapannya untuk pencairan Gaji dan Tunjangan ASN ke BPKPD												
SUB KEGIATAN		: KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD												
13.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1. Memaraf SK Pembentukan tim Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 14.342.000											
		2. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi keuangan untuk menyiapkan dokumen realisasi belanja dan aset per triwulan												
		3. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi keuangan untuk melakukan rekonsiliasi data akun-akun laporan keuangan per triwulan												
		4. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi keuangan untuk menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun												
		5. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi keuangan untuk melakukan review Laporan Keuangan Akhir Tahun di Inspektorat.												
		6. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD kiranya mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi keuangan untuk menyampaikan laporan Keuangan Akhir Tahun ke BPKPD.												

SUB KEGIATAN		: PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
14.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BPK dan Inspektorat	1.	Memaraf SK Pembentukan Tim Tindak Lanjut OPD	Rp	7.308.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

SUB KEGIATAN		: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI															
16.	Pelaksanaan dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.	Meneruskan surat masuk ke Kepala Pelaksana BPBD dari lembaga penyedia Diklat/bimtek	Rp	124.756.000												
		2.	Mengkoordinasikan dengan kepala pelaksana BPBD ditujukan kepada ASN yang akan mengikuti Diklat/Bimtek														
		3.	Pelaksanaan Diklat/ Bimtek														
17.	Penyediaan laporan Daftar Urut Kenaikan (DUK), Kenaikan Gaji Berkala	1.	Menginstruksikan kepada Kasubag.umum kepegawaian untuk membuat laporan Daftar Urut Kenaikan (DUK) ASN	Rp	-												
		2.	Menginstruksikan kepada Kasubag.umum kepegawaian untuk memfasilitasi pegawai ASN dalam pengurusan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)														
18.	Fasilitasi Kenaikan Pangkat Pegawai ASN	1.	Menginstruksikan kepada Kasubag.umum kepegawaian untuk memfasilitasi pegawai ASN dalam pengurusan Kenaikan Pangkat Pegawai ASN melalui aplikasi e-pangkat	Rp	-												
SUB KEGIATAN		: PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR															
19.	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (alat-alat yang berhubungan dengan listrik)	1	Menginstruksikan kepada Kasubag. Umum & Kepegawaian untuk membuat surat/kontrak pesanan barang	Rp	6.401.000												
		2.	Menginstruksikan kepada Kasubag. Umum & Kepegawaian untuk membuat berita acara serah terima barang setelah barang diterima														
		3.	Memverifikasi kuitansi pembayaran														
SUB KEGIATAN		: PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANGKATAN															
20.	Penyediaan barang cetakan dan Pengangkutan untuk keperluan kantor seperti baliho, spanduk, banner dll)	1.	Menginstruksikan kepada Kasubag. Umum & Kepegawaian untuk melaksanakan proses pengadaan penyediaan barang cetakan dan pengangkutan melalui proses e-purchasing pada aplikasi LPSE	Rp	10.423.800												

SUB KEGIATAN : PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA												
24. Pengadaan bahan/alat untuk kegiatan kantor (1 Unit sound system dan 2 Buah TV) dan (Laptop sebanyak 2 unit)	1.	Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk menginstruksikan kepada pejabat yang menangani subbag.umum untuk membuat penawaran barang melalui proses e-purchasing pada aplikasi LpSE	Rp	36.500.000								
	2.	Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk menginstruksikan kepada pejabat yang menangani subbag.umum untuk membuat negosiasi penawaran antara PPK dengan penyedia/rekanan										
	3.	Memverifikasi berkas pencairan pembayaran barang melalui proses LS										
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA SURAT-MENYURAT												
25. Penyediaan proses surat-menyurat	1.	Menginstruksikan kepada Kasubag. Umum & Kegawayaan untuk mengontrol absensi kehadiran pegawai ASN & PHL	Rp	-								
	4.	Menginstruksikan kepada Kasubag. Umum Kegawayaan untuk memantau proses kegiatan administrasi perkantoran kepegawaian (arsip surat, penomoran dan pencatatan surat)										
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK												
26. Penyediaan pembayaran listrik dan Jasa komunikasi (Wifi)	1.	Menginstruksikan kepada pejabat yang menangani subbag.umum untuk melakukan pembayaran rekening listrik & jasa komunikasi (wifi) sesuai tagihan yang tertera pada struk tagihan	Rp	134.100.000								
	2.	Memverifikasi kuitansi pembayaran										
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR												
27. Penyediaan gaji PHL (Sekretariat) dan Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	1.	Memverifikasi usulan PHL	Rp	373.770.700								
	2.	Menginstruksikan kepada pejabat yang menangani subbag.umum dan Kegawayaan untuk membuat SK sesuai usulan yang disetujui oleh Sekda										
	3.	Memverifikasi kuitansi pembayaran gaji PHL										

SUB KEGIATAN		: PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA														
32.	Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor	1.	Mengintruksikan kepada Kasubag. Umum & Kepegawaian untuk membuat nota pesanan barang	Rp	30.063.000											
		2.	Mengintruksikan kepada Kasubag. Umum & Kepegawaian untuk membuat berita acara serah terima barang setelah barang diterima													
		3.	Memverifikasi kuitansi pembayaran													

Semarang, 22 Januari 2024
 SEKRETARIS,
 PATYA BAU, S.Sos., M.Si.
 NIP : 19760611 200502 1 010

KEPALA PELAKSANA BPBD,
 Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.
 NIP : 19700726 199101 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. NURMIATI B., M.M
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PATTA BAU, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


PATTA BAU, S.Sos., M.Si.


Dra. Hj. NURMIATI B., M.M.

PERJANJIAN KINERJA
KASUBAG. UMUM KEPEGAWAIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1. Penyediaan laporan aset milik Daerah SKPD	Rp 5.000.000	Laporan
		2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan bimtek berdasarkan tugas dan fungsi	Rp 124.756.000	Laporan
				3. Penyediaan laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Kenaikan Gaji Berkala		Laporan
				4. Fasilitas Kenaikan Pangkat Pegawai ASN		Dokumen
		3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (alat-alat yang berhubungan dengan listrik)	Rp 6.401.000	Dokumen
			4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan kantor seperti baliho, spanduk, banner dll)	Rp 10.423.800	Dokumen
			5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7. Penyediaan surat kabar	Rp 5.000.000	Dokumen
			6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8. Pelaksanaan rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Rp 386.289.500	Laporan
		4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Pengadaan Mebel	9. Penyediaan meubeler meja rapat 2 unit, meja receptionist 1 paket, kursi futura 32 buah, meja pejabat 2 buah dan kursi pejabat 10 buah	Rp 87.164.000	Dokumen

	o Pengadaan Retrauan dan Mesin Lainnya	10. Pengadaan nanan/alat untuk kegiatan kantor (1 unit sound system dan 2 buah TV) dan Laptop sebanyak 2 unit	Kp	30.500.000	Dokumen
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp	Laporan
		10.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	Laporan
		11.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	Laporan
		12.	Penyediaan jasa komunikasi	Rp	Laporan
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.	Penyediaan gaji PHL (Sekretariat) dan Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	Rp	Laporan
		14	Penginputan SiRUP	Rp	Laporan
		15.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit	Rp	Dokumen
		16.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 23 unit	Rp	Dokumen
		17.	Pemeliharaan alat kantor, alat pendingin dan pemeliharaan komputer	Rp	Dokumen
		18.	Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor	Rp	Dokumen
		TOTAL		Rp	1.408.718.000

Bentang, 22 Januari 2024
KASUBAG. UMUM KEPEGAWALAN,

Normal

Dra. Hl. NURMIATI B. M. M.
NIP : 19680104 199603 2 003

SEKRETARIS BADAN,
[Signature]

PATTA BAU, S.Sos., M.Si.
NIP : 19760611 200502 1 010

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024

NO.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT		
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
SUB KEGIATAN				: PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD														
1.	Penyediaan Laporan aset milik Dacrah SKPD	1. Menginstruksikan kepada pengurus barang untuk mengelola/mencatat barang milik daerah secara berkala 2. Menginstruksikan kepada pengurus barang untuk melakukan koordinasi dan konsultasi (rekonsiliasi aset) di bidang aset BPKPD secara berkala	Rp 5.000.000															
SUB KEGIATAN				: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI														
2.	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Menerima surat masuk dari lembaga penyedia Diklat/bimtek 2. Mengkoordinasikan dengan atasan (Sekretaris) untuk mendisposisi kepada ASN yang akan mengikuti Diklat/Bimtek 3. Mengikuti Pelaksanaan Diklat/ Bimtek 4. Membuat laporan pelaksanaan Diklat/Bimtek	Rp 124.756.000															
3.	Penyediaan laporan Daftar Urut Kepingkatan (DUK), Kenaikan Gaji Berkala	1. Menginstruksikan kepada staf untuk membuat laporan Daftar Urut 2. Memfasilitasi Pegawai ASN untuk pengurusan Kenaikan Gaji Berkala seperti pembuatan surat permohonan bebas temuan yang ditujukan kepada Inspektorat 3. Menginstruksikan kepada staf untuk mengirimkan draft surat kenaikan gaji berkala ke BKPSDM untuk diberikan penomoran surat	Rp -															

SUB KEGIATAN		: PENGADAAN MEBEL														Rp	87.164.000
9.	Penyediaan meubeler kursi rapat sebanyak 32 buah, meja rapat 2 buah, 1 meja reseptionist dan 2 meja kerja biro	1. Menginstruksikan kepada staf untuk membuat penawaran barang melalui proses e-purchasing pada aplikasi LPSE															
		2. Melakukan koordinasi dengan penyedia jasa/rekanan pada penyediaan meubeler															
		3. Menginstruksikan kepada staf untuk membuat negosiasi penawaran antara PPK dengan penyedia/rekanan															
		4. Menginstruksikan kepada staf untuk membuat berita acara pemeriksaan hasil pengadaan barang dan jasa, berita acara serah terima barang, berita acara kemajuan pekerjaan															
		5. Menandatangani dokumen pengadaan penyediaan meubeler sebagai PPTK															
SUB KEGIATAN		: PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA														Rp	36.500.000
10.	Pengadaan bahan/alat untuk kegiatan kantor (komputer sebanyak 1 unit)	1. Menginstruksikan kepada staf untuk membuat penawaran barang melalui proses e-purchasing pada aplikasi LPSE															
		2. Melakukan koordinasi dengan penyedia jasa/rekanan pada penyediaan															
		3. Menginstruksikan kepada staf untuk membuat negosiasi penawaran antara PPK dengan penyedia/rekanan															
		4. Menginstruksikan kepada staf untuk membuat berita acara pemeriksaan hasil pengadaan barang dan jasa, berita acara serah terima barang, berita acara kemajuan pekerjaan															
		5. Menandatangani dokumen pengadaan penyediaan meubeler sebagai PPTK															

SUB KEGIATAN		: PENYEDIAAN JASA SURAT-MENYURAT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
11.	Penyediaan proses surat-menyurat	1.	Menginstruksikan kepada staf untuk membuat daftar hadir dan merekap kehadiran pegawai ASN & PHL	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

SUB KEGIATAN		: PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
17.	Pemeliharaan alat kantor, alat pendingin dan pemeliharaan komputer	1.	Melakukan koordinasi dengan penyedia jasa untuk melakukan pembelian suku cadang, jasa service pada penyediaan pemeliharaan alat kantor, alat pendingin dan pemeliharaan komputer	Rp	31.030.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

Benteng, 22 Januari 2024
KASUBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN,

Nurmiati
Dra. Hj. NURMIATI B., M.M.
 Nip : 19680104 199603 2 003

SEKRETARIS BADAN,
Patta Bau, S.Sos., M.Si.
PATTA BAU, S.Sos., M.Si.
 Nip : 19760611 200502 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAKRI BAHAR, S. Kom.
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Hj. NURMIATI B., M.M
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

Dra.Hj. NURMIATI B., M.M

Pihak Pertama,

BAKRI BAHAR, S. Kom.

PERJANJIAN KINERJA
PENELAHAH TEKNIKIS KEBIJAKAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
1	2	3		4		5	6	7
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Penyediaan laporan aset milik daerah SKPD	Rp	Laporan
		2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan bintek berdasarkan tugas dan fungsi	Rp	Laporan
						3. Penyediaan laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Kenaikan Gaji Berkala	Rp	Laporan
						4. Fasilitas Kenaikan Pangkat Pegawai ASN	Rp	Laporan
		3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5. Pelaksanaan rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Rp	Laporan
		4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.	Pengadaan Mebel	6. Penyediaan meubeler kursi rapat sebanyak 32 buah, meja rapat 2 buah, meja resepsionist 1 buah, meja kerja biro 2 buah	Rp	Dokumen
				5.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7. Pengadaan bahan/alat untuk kegiatan kantor (1 unit sound system dan 2 buah TV) dan (Laptop sebanyak 2 unit	Rp	Dokumen

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAJAN,

[Signature]

Dra. Hj. NURMIATI B. M.M.

NIP : 19680104 199603 2 003

Benteng, 22 Januari 2024

PENELAHAH TEKNIKIS KEBIJAKAN,

[Signature]

BAKRI BAHAR, S. Kom.

NIP. 19770617 201001 1 004

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024**

NO.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT	
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
SUB KEGIATAN				: PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD													
1.	Penyediaan laporan aset milik daerah SKPD	1. Melakukan pencatatan Rencana Kebutuhan Barang Unit Milik Daerah (RKBU) secara berkala sebagai Pengurus Barang 2. Melakukan koordinasi dan konsultasi (Rekonsiliasi) aset di bidang aset BPKPD secara berkala	Rp -														
SUB KEGIATAN				: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI													
2.	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Mengetik surat tugas untuk pegawai yang akan melaksanakan diklat/bimtek 2. Mengetik lembar SPPD untuk pegawai yang akan melaksanakan diklat/bimtek 3. Mengetik Laporan Pelaksanaan kegiatan diklat/bimtek	Rp -														
3.	Penyediaan laporan Daftar Urut Kenaikan Gaji Berkala	1. Mengetik Daftar Urut Kepangkatan (DUK) ASN 2. Mengetik Surat permohonan bebas temuan yang ditujukan ke Inspektorat sebagai bahan kelengkapan kenaikan gaji berkala	Rp -														

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029

BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI RUDI KURNIAWAN

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Hj. NURMIATI B., M.M

Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

Dra. Hj. NURMIATI B., M.M

Pihak Pertama,

ANDI RUDI KURNIAWAN

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (alat-alat yang berhubungan dengan listrik)	Rp	Dokumen
			2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan untuk keperluan kantor seperti baliho, spanduk, banner dll)	Rp	Dokumen
		2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3. Penginputan SiRUP	Rp	Laporan
		3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	4. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit	Rp	Dokumen
			4. Penyediaan Jasa Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 23 unit	Rp	Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
1	2	3	4	5	6	7
			5. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6. Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor	Rp	Dokumen

Benteng, 22 Januari 2024

KASUBAG. UMUM KEPEGAWAIAN,

Nurmiati

Dra. Hi. NURMIATI B. M.M.
NIP : 19680104 199603 2 003

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN,

Andi Rudi Kurniawan

ANDI RUDI KURNIAWAN
NIP. 19790717 200801 1 024

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024

NO.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SUB KEGIATAN				: PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (alat-alat yang berhubungan dengan listrik)	1. Mengetik surat pesanan barang 2. Mengetik berita acara serah terima barang 3. Mengetik kuitansi pembayaran	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

[illegible]

SUB KEGIATAN		: PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN																			
4.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 23 unit	1.	Mengetik nota pesanan barang belanja pemeliharaan kendaraan operasional atau lapangan	Rp																	
					2.	Mengetik berita acara serah terima barang belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan															
							3.	Mengetik kuitansi pembayaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan													
SUB KEGIATAN		: PEMELIHARAAN / REHABILITASI KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA																			
5.	Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor	1.	Mengetik nota pesanan barang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor																		
					2.	Mengetik berita acara serah terima barang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor															
							3.	Mengetik kuitansi pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor													

Bonteng, 22 Januari 2024

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN,

ANDI RUDI KURNIAWAN
NIP. 19790717 200801 1 024

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

Dra. Hl. NURMIATI B., M.M.
NIP. 119680104 199603 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUDARMIN SYAM
Jabatan : Pengadministrasi Umum Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Hj. NURMIATI. B., M.M.
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

Dra. Hj. NURMIATI. B., M.M.

Pihak Pertama,

SUDARMIN SYAM

PERJANJIAN KINERJA
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		INDIKATOR		MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
		3		4		5			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1. Administrasi Umum perangkat Daerah	1.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		Rp	Dokumen
		2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.	Penyediaan surat kabar		Rp	Laporan
			3.	Penyediaan jasa surat menyurat	3.	Pelaksanaan proses surat-menyurat		Rp	Laporan
			4.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4.	Penyediaan pembayaran listrik dan jasa komunikasi (Wifi)		Rp	Laporan
			5.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.	Penyediaan gaji PHL (Sekretariat dan Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non ASN		Rp	Laporan
			6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	6.	Pemeliharaan alat kantor, alat pendingin dan pemeliharaan komputer		Rp	Dokumen

Benteng, 22 Januari 2024

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN,



Dra. Hj. NURMIATI B. M.M.
NIP : 19680104 199603 2 003

SUDARMIN SYAM
NIP. 197790306 200801 1 024

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024**

NO.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT	
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
: PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD																	
1.	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1. Mengagenda surat masuk berupa surat undangan pertemuan/rapat koordinasi dalam dan luar daerah 2. Melakukan penomoran surat tugas dan SPPD 3. Melakukan penomoran surat keluar yang ditujukan kepada Instansi/OPD	Rp														
: PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN																	
2.	Penyediaan surat kabar	1. Mengagenda surat permintaan berlangganan dari media cetak 2. Mengetik Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kuitansi pembayaran 3. Mencatat surat kabar yang diterima setiap harinya	Rp														
: PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT																	
3.	Pelaksanaan proses surat menyurat	1. Membuat daftar hadir dan merekap kehadiran pegawai ASN & PHL 2. Menerima, mencatat surat masuk, surat keluar, surat tugas dan SPPD serta menyampaikan ke bidang yang bersangkutan sesuai disposisi pimpinan	Rp														



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : APRIANA USMAN, S.E., M.M
Jabatan : Kasubag. Hukum Perencanaan dan Pelaporan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PATTA BAU, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

PATTA BAU, S.Sos., M.Si.

APRIANA USMAN, S.E., M.M

PERJANJIAN KINERJA
KASUBAG. HUKUM PERENCANAAN DAN PELAPORAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Penyusunan Renja	Rp 7.900.000	Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Revisi Renstra		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp 5.872.000	Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp 5.872.000	Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Rp 5.872.000	Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Rp 5.872.000	Dokumen
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan LAKIP, LKPU, LPPD dan SPM	Rp 12.694.000	Laporan
			Total		Rp 44.082.000	

SEKRETARIS BADAN,

PATTA BAU, S.Sos., M.Si.
NIP : 19760611 200502 1 010

Benteng, 22 Januari 2024

KASUBAG. HUKUM PERENCANAAN DAN PELAPORAN

APRIANA USMAN, S.E., M.M.
NIP : 19830430 201001 2 029

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KASUBAG. HUKUM PERENCANAAN DAN PELAPORAN
TAHUN 2024

NO.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT		
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
SUB KEGIATAN				: PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH														
1.	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	1. Membuat SK Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Renja OPD	Rp 7.900.000															
		2. Mengikuti pertemuan bimtek penyusunan Renja yang dilaksanakan oleh bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda																
		3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																
		4. Penyiapan usulan rancangan Renja dari Bidang dan Sekretariat																
		5. Menyusun Rancangan Renja																
		6. Menyiapkan bahan materi pelaksanaan Forum OPD																
		7. Menyampaikan Rancangan Renja ke BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi																
		8. Menyempurnakan Rancangan renja berdasarkan saran dan rekomendasi dan disampaikan kembali ke BAPPELITBANGDA untuk dilakukan Proses Penetapan Akhir Renja																
		9. Dokumen Renja																

[illegible]

SUB KEGIATAN		: KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5. Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1. Membuat SK Pembentukan tim Penyusun Dokumen DPA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

SUB KEGIATAN		: KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD																
6. Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1. Membuat SK Pembentukan tim Penyusun Dokumen DPA Perubahan	Rp 5.872.000																
	2. Menghadiri rapat kerja dengan tim anggaran DPRD																	
	3. Melakukan koordinasi PPAS																	
	4. Penyusunan rencana kegiatan berdasarkan pagu anggaran dari keuangan (BPKPD)																	
	5. Meminta dan mengumpulkan usulan kegiatan dari bidang																	
	6. Menginput usulan kegiatan di aplikasi SIPD																	
	7. Melakukan asistensi DPA Perubahan di TAPD																	
	8. Melakukan reuiu DPA Perubahan di Inspektorat																	
	9. Perbaikan rencana kegiatan oleh PPTK																	
	10. Melakukan reuiu ulang ke Inspektorat setelah melakukan perbaikan DPA																	
	11. Meminta penandatanganan DPA Perubahan oleh tim TAPD																	
	12. Meminta Penandatanganan oleh Kepala Dinas/Kepala Pelaksana																	
	13. Menyampaikan DPA Perubahan ke tim anggaran/tim asistensi																	
	14. Dokumen DPA Perubahan																	

SUB KEGIATAN		: EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH														
7. Penyusunan LAKIP	1.	Pembentukan tim Penyusun Dokumen LAKIP														Rp12.694.000
	2.	Memahami kebijakan yang berkaitan dengan LAKIP														
	3.	Mengumpulkan data internal OPD														
	4.	Membahas & mengklarifikasi data internal yang terkumpul														
	5.	Menyusun rekapitulasi anggaran														
	6.	Menyusun pengukuran kinerja														
	7.	Menyusun evaluasi kinerja														
	8.	Melakukan Penyusunan LAKIP														
	9.	Menyampaikan LAKIP yang telah disusun kepada pimpinan untuk ditandatangani atau disahkan kemudian disampaikan ke Bagian Orpeg Setda														
	10.	Menyempurnakan Dokumen LAKIP berdasarkan saran dan rekomendasi dan disampaikan kembali ke Bagian Orpeg Setda														
	11.	Dokumen LAKIP														
8. Penyusunan LKPJ	1.	Pembentukan Tim Penyusun Dokumen LKPJ														
	2.	Membuat format pengumpulan data capaian kinerja masing - masing bidang dan sekretariat														
	3.	Menyampaikan format pengumpulan data capaian kinerja ke masing - masing bidang dan sekretariat														
	4.	Menghimpun format pengumpulan data capaian kinerja dari masing - masing bidang dan sekretariat														



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029

BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PATTA BUNDU, S.M.

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : APRIANA USMAN, S.E., M.M.

Jabatan : Kasubag. Hukum, Perencanaan dan Pelaporan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Februari 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


APRIANA USMAN, S.E., M.M.


PATTA BUNDU, S.M.

PERJANJIAN KINERJA
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Penyusunan Renja	Rp	Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Revisi Renstra	-	-
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp	Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp	Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Rp	Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Rp	Dokumen
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan LAKIP, LKPJ, LPPD dan SPM	Rp	Laporan

Benteng, 22 Februari 2024

KASUBAG. HOKUM PERENCANAAN DAN PELAPORAN,

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,

APRIANA USMAN, S.E., M.M.
NIP : 19830430201001 2 029

PATTA BUNDU, S.M.
NIP : 19750714 201407 1 003

TAHUN 2024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI LAPANG, SP.

Jabatan : Kasubag. Keuangan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PATTA BAU, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


PATTA BAU, S.Sos., M.Si.


ANDI LAPANG, SP.

PERJANJIAN KINERJA KASUBAG. KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja PD	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) SKPD	Rp 7.750.000	Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun	Rp 1.840.776.400
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas laporan keuangan)	Rp 14.342.000	Laporan	
		4. Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4. Pengelolaan dan penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BPK dan Inspektorat	Rp 7.308.000	Dokumen	
Total					Rp 1.870.176.400	

SEKRETARIS BADAN,

PATTA BAU, S.Sos., M.Si.
NIP : 19760611 200502 1 010

Benteng, 22 Januari 2024

KASUBAG. KEUANGAN,


INDIAPANG S.P.
NIP : 19681102 200604 1 011

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
KASUBAG. KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024

NO.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT			
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES				
SUB KEGIATAN		: KOORDINASI DAN PEYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD																	
1.	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)	1. Pembentukan tim penyusun laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) SKPD 2. Mengumpulkan dokumen terkait realisasi dan penyerapan anggaran SKPD 3. Menyusun laporan capaian kinerja SKPD 4. Menyampaikan dokumen capaian kinerja SKPD ke Bagian Pembangunan Setda, Bappelitbangda dan BPKPD	Rp 7.750.000																
SUB KEGIATAN		: PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN																	
2.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1. Penerimaan ampra gaji dan tunjangan ASN dari BPKPD 2. Menyiapkan SPP dan SPM Gaji dan Tunjangan ASN 3. Menyampaikan SPP dan SPM beserta kelengkapannya untuk pencairan Gaji dan Tunjangan ASN ke BPKPD 3. Memindahbukukan gaji dan tunjangan ASN ke rekening masing-masing	Rp 1.840.776.400																

: KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD											
SUB KEGIATAN											
3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan)	1. Pembentukan SK Tim Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp	11.342.000								
	2. Menyiapkan dokumen realisasi belanja dan aset per triwulan										
	3. Melakukan rekonsiliasi data akun-akun laporan keuangan per triwulan										
	4. Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun										
	5. Melakukan review Laporan Keuangan Akhir Tahun di Inspektorat										
	6. Menyampaikan laporan keuangan akhir tahun ke BPKPD										
SUB KEGIATAN	: PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN										
4. Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan BPK dan Inspektorat	1. Pembentukan Tim Tindak Lanjut OPD	Rp	7.308.000								
	2. Menyiapkan dokumen pemeriksaan										
	3. Menerima LHP BPK dan Inspektorat										
	4. Rapat Koordinasi Tim Tindak Lanjut OPD										
	5. Menyusun bahan tanggapan pemeriksaan										
	6. Menyampaikan tanggapan pemeriksaan										

Benteng, 22 Januari 2024

KASUBANG KEUANGAN,


 ANDI LILI PANG, S.P.
 NIP. 19661102 200604 1 011

SEKRETARIS,


 PATTABAU, S.Sos., M.Si.
 NIP. 19760611 200502 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERIYANTO, S.A.P., M.M
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI LAPANG, SP.
Jabatan : Kasubag. Keuangan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,


ANDI LAPANG, S.P.

Pihak Pertama,


HERIYANTO, S.A.P., M.M

PERJANJIAN KINERJA
PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
1	2	3	4		5	6	7
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja PD	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) SKPD	Rp	Laporan
			2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	Dokumen
			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan)	Rp	Laporan
			4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4 Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan BPK dan Inspektorat	Rp	Dokumen

KASUBAG. KEUANGAN,

ANDI LAPANG, S.P.
 NIP : 19681102 200604 1 011

Benteng, 22 Januari 2024

PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN,

HERIYANTO, S.A.P., M.M.
 NIP : 19840914 201407 1 001

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024**

NO.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT			
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES				
SUB KEGIATAN				: KOORDINASI DAN PEYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD															
1.	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)	1.	Mengetik SK tim Penyusun Laporan Realisasi Fisik dan	Rp															
		2.	Menyusun dokumen terkait realisasi dan penyerapan anggaran SKPD																
		3.	Mengetik laporan capaian kinerja SKPD																
		4.	Melaporkan dokumen capaian kinerja SKPD ke Bagian Pembangunan Setda, Bappelitbangda dan BPKPD																
SUB KEGIATAN				: PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN															
2.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.	Mengambil ampra gaji dan tunjangan ASN di BPKPD	Rp															
		2.	Mengetik SPP dan SPM Gaji dan Tunjangan ASN																
		3.	Membawa SPP dan SPM beserta kelengkapannya untuk pencairan gaji dan tunjangan ASN ke BPKPD																

SUB KEGIATAN		: KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD																
3.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan)	1.	Mengetik SK Tim Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp														
		2.	Mengolah laporan realisasi belanja dan aset per triwulan															
		3.	Mendampingi Kasubag. Keuangan untuk melakukan rekonsiliasi data akun-akun laporan keuangan per triwulan di BPKPD															
		4.	Mengetik Laporan Keuangan Akhir Tahun															
		5.	Mendampingi Kasubag. Keuangan untuk melakukan revidi Laporan Keuangan Akhir Tahun di Inspektorat															
		6.	Membawa Laporan Keuangan Akhir Tahun ke BPKPD															
		7.	Mengetik laporan pelaksanaan kegiatan															
SUB KEGIATAN		: PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN																
4.	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BPK dan Inspektorat	1.	Mengetik SK Tim Tindak Lanjut OPD															
		2.	Menyiapkan bahan rapat koordinasi Tindak Lanjut OPD															
		3.	Mendokumentasikan pelaksanaan koordinasi Tindak Lanjut OPD															



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR SALIM MUCHTAR, S.E.

Jabatan : Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.

NUR SALIM MUCHTAR, S.E.

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABID. PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
1.	Program Penanggulangan Bencana	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota	Pelaksanaan Sosialisasi Mitigasi Bencana (Pembentukan Desa Tangguh Bencana)	Rp 100.000.000	Laporan
		2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	2. Penguatan Kapasitas kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana	Rp 100.000.000	Laporan
			3. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/kota	- Melakukan Pendataan Survey terkait jenis ancaman yang bisa/ mungkin mengakibatkan terjadinya risiko bencana - Melakukan eksekusi/ penanganan terhadap jenis ancaman yang dapat/ mungkin mengakibatkan risiko bencana - Melakukan kegiatan mitigasi bencana yang dapat mengurangi dampak risiko bencana (penanaman pohon)	Rp 100.000.000	Laporan
Total					Rp 300.000.000	

Mengetahui :
Kepala Pelaksana BPBD

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub
Nip : 19700726 199101 1 002

Benteng, 22 Januari 2024

Kabid. Pencegahan & Kesiapsiagaan,

MUR SALIM MUHTAR, S.E.
Nip : 19730123 200701 1 015

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
KABID. PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
SUB KEGIATAN				: SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS BENCANA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.	Pelaksanaan Sosialisasi Mitigasi Bencana (Pembentukan Desa Tangguh Bencana)	1. Melaksanakan rapat Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan	Rp 100.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

SUB KEGIATAN		: Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan											
2.	Pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana	1.	Membentuk tim pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu papan informasi bencana	Rp 100.000.000									
		2.	Melaksanakan rapat kerja tim terkait pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana										
		3.	Melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat (Camat/Lurah/Kepala Desa) dalam rangka pelaksanaan pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana										
		4.	Melakukan Pelaksanaan kegiatan pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana di Desa Bontosunggu Kec. Bontoharu dan Desa Batang Kec. Takabonerate										

SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA			
3.	Melakukan Pendataan Survey terkait jenis ancaman yang bisa/mungkin mengakibatkan terjadinya risiko bencana	1. Melakukan rapat Pembentukan tim pelaksana kegiatan 2. Menginstruksikan kepada pej. fungs. untuk menindaklanjuti apabila ada surat masuk terkait kegiatan pengurangan risiko bencana	Rp 100.000.000
4.	Melakukan penanganan terhadap jenis ancaman yang dapat/ mungkin mengakibatkan risiko bencana	1. Menginstruksikan kepada Pej.Fungsional untuk melakukan survey lokasi di lapangan yang berpotensi rawan bencana 2. Memantau pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko bencana	
5.	Melakukan kegiatan mitigasi bencana yang dapat mengurangi dampak risiko bencana (penanaman Mangrove)	1. Menginstruksikan kepada Pej. Fungsional untuk melakukan survey lokasi di desa yang akan dilakukan penanaman mangrove di Desa Barugaia Kec. Bontomanai 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dalam pengadaan bibit mangrove 3. Mengkoordinir pelaksanaan Penanaman Mangrove di Desa Barugaia Kec. Bontomanai	

Bonteng, 22 Januari 2024
KABID. PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN,

NOR SALIM MUBCHTAR, S.E.
Pangkat : Pembina
Nip : 19730123 200701 1 015

MENGETAHUI :
KEPALA PELAKSANA BPBD,
Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19700726 199101 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAHRUL, SE.

Jabatan : Analis Kebencanaan Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR SALIM MUCHTAR, S.E.

Jabatan : Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


NUR SALIM MUCHTAR, S.E.


SYAHRUL, S.E.

PERJANJIAN KINERJA
ANALIS KEBENCANAAN MUDA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program Penanggulangan Bencana	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota	Pelaksanaan Sosialisasi Mitigasi Bencana (Pembentukan Desa Tangguh Bencana)	Rp	Laporan
		2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	2. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/kota	- Melakukan Pendataan Survey terkait jenis ancaman yang bisa/mungkin mengakibatkan terjadinya risiko bencana - Melakukan eksekusi/penanganan terhadap jenis ancaman yang dapat/mungkin mengakibatkan risiko bencana - Melakukan kegiatan mitigasi bencana yang dapat mengurangi dampak risiko bencana (penanaman pohon)	Rp	Laporan
			3. Penguatan Kapasitas kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana	Rp	Laporan

Mengetahui :
Kabid. Pencegahan & Kesiapsiagaan,


NUR SALIM MUCHTAR, S.E.
Nip : 19730123 200701 1 015

Benteng, 22 Januari 2024

Analisis Kebencanaan Muda



SYAHRUL, S.E.
Nip : 19740405 200701 1 037

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
ANALIS KEBENCANAAN MUDA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024

NO.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
SUB KEGIATAN				: SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS BENCANA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.	Pelaksanaan Sosialisasi Mitigasi Bencana (Pembentukan Desa Tangguh Bencana)	1. Menyiapkan bahan materi rapat Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi	Rp -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA			
2.	Melakukan Pendataan Survey terkait jenis ancaman yang bisa/mungkin mengakibatkan terjadinya risiko bencana	1. Menyiapkan bahan materi rapat. Pembentukan tim pelaksana kegiatan	Rp
		2. Menindaklanjuti arahan Kabid. Untuk meninjau Langsung lokasi yang akan dilakukan penanganan sesuai dengan surat masuk	
		3. Melaporkan hasil Peninjauan lokasi kepada atasan Langsung	
3.	Melakukan penanganan terhadap jenis ancaman yang dapat/mungkin mengakibatkan risiko bencana	1. Melakukan survey lokasi di lapangan yang berpotensi rawan bencana	
		2. Melaksanakan Penanganan terhadap jenis ancaman yang dapat/mungkin mengakibatkan risiko bencana	
4.	Melakukan kegiatan mitigasi bencana yang dapat mengurangi dampak risiko bencana (penanaman pohon)	1. Melakukan survey lokasi di desa yang akan dilakukan penanaman Mangrove di Desa Barugala Ker. Bontomatene	
		2. Mendampingi Kabid. untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dalam pengadaan bibit mangrove	
		3. Penanaman Mangrove di Desa Barugala Ker. Bontomatene	

SUB KEGIATAN		: Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan											
5.	Pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana	1.	Menyiapkan bahan/materi pembentukan tim pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu papan informasi bencana	Rp									
		2.	Menyiapkan materi rapat kerja tim terkait pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana										
		3.	Mendampingi Kabid. untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat (Camat/Lurah/Kepala Desa) dalam rangka pelaksanaan pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana										
		4.	Ikut serta pada pelaksanaan kegiatan pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana di Desa Bontosunggu Kec. Bontomanai dan Desa Batang Kec. Takabonerate										

Benteng, 22 Januari 2024

Analisis Kebencanaan Muda

SYAHRUL, S.E.

Nip : 19740405 200701 1 037

Mengetahui :
Kabid. Pencegahan & Kesiapsiagaan,

NUR SALIM MUCHTAR, S.E.

Nip : 19730123/200701 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RANI ENDANG ASTUTI, S.Sos.

Jabatan : Analis Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR SALIM MUCHTAR, S.E.

Jabatan : Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


NUR SALIM MUCHTAR, S.E.


RANI ENDANG ASTUTI, S.Sos.

**PERJANJIAN KINERJA
PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
1.	Program Penanggulangan Bencana	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota	5 Pelaksanaan Sosialisasi Mitigasi Bencana (Pembentukan Desa Tangguh Bencana)	6 Rp	7 Laporan
		2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	2. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/kota	- Melakukan Pendataan Survey terkait jenis ancaman yang bisa/ mungkin mengakibatkan terjadinya risiko bencana	Rp	Laporan
				- Melakukan eksekusi/ penanganan terhadap jenis ancaman yang dapat/ mungkin mengakibatkan risiko bencana	Rp	
				- Melakukan kegiatan mitigasi bencana yang dapat mengurangi dampak risiko bencana (penanaman pohon)	Rp	
			3. Penguatan Kapasitas kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana	Rp	Laporan

Benteng, 22 Januari 2024

Penelaah Teknis Kebijakan

Mengetahui :
Kabid. Pencegahan & Kesiapsiagaan,


NUB-GALIM MUCHTAR S.E.
Nip : 19730123-200701 1 015


RANI ENDANG ASTUTI, S.Sos
Nip : 19950501 202012 2 001

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN
TAHUN 2024

NO.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT														
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES															
SUB KEGIATAN				: SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS BENCANA)																										
1.	Pelaksanaan Sosialisasi Mitigasi Bencana (Pembentukan Desa	1. Menyiapkan rapat Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan	Rp -																											
		2. Mengetik surat undangan peserta, undangan pemateri, daftar hadir peserta dan dokumen pendukung lainnya																												
		3. Menyiapkan pelaksanaan sosialisasi																												
		4. Mendokumentasikan Pelaksanaan sosialisasi																												
		5. Mengetik SPJ pelaksanaan Sosialisasi																												
		6. Mengetik laporan pelaksanaan kegiatan																												
SUB KEGIATAN				: PENGELOLAAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA																										
2.	Melakukan Pendataan Survey terkait jenis ancaman yang bisa/mungkin mengakibatkan terjadinya risiko bencana	1. Menyiapkan rapat Pembentukan tim pelaksana kegiatan	Rp -																											
		2. Mengagenda surat dari Desa/Kelurahan/Dinas apabila ada surat masuk terkait permohonan penebangan/pemangkasan pohon yang berisiko bencana																												
		3. Mengetik Laporan Pelaksanaan Kegiatan																												



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD IKBAL, SE
Jabatan : Kabid. Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.

Pihak Pertama,

MUHAMMAD IKBAL, SE

PERJANJIAN KINERJA
KABID. KEDARURATAN DAN LOGISTIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN BELAYAR
TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
1	Program Penanggulangan Bencana	3	4	5	6	7
1	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	bintek peningkatan SDM TRC	Rp 35.000.000	Laporan
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	pertolongan dan evakuasi korban bencana	Rp 45.000.000	Laporan
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	fasilitasi penyediaan & pemberian bantuan logistik dan peralatan	Rp 75.000.000	Laporan
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	koordinasi dengan dinas terkait penanganan bencana pertolongan dan evakuasi korban bencana	Rp 155.000.000	Laporan
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	pengelolaan PUSDALOPS PB (pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana)	Rp 40.000.000	Laporan
					Rp 350.000.000	

MENGETAHUI :
KEPALA PELAKSANA BPBD,

DR. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.
NIP. 19700726 199101 1 002

Benteng, 22 Januari 2024

KABID. KEDARURATAN DAN LOGISTIK,


MUHAMMAD IQBAL, SE.
NIP : 19761019 201101 1 003

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
KABID. KEDARURATAN DAN LOGISTIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT		
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
SUB KEGIATAN : PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) BENCANA KABUPATEN/KOTA																		
1.	Bimtek Peningkatan SDM TRC	1. Menerima surat panggilan usulan peserta diklat pengembangan SDM TRC	Rp 35.000.000															
		2. Menindaklanjuti Surat Pemanggilan Peserta Bimtek dari BNPB																
		3. Melakukan koordinasi dengan Kalaksa BPBD untuk meminta Persetujuan mengikuti Bimtek																
		4. Mengikuti Bimtek Peningkatan SDM TRC																
		5. Mengonsep Laporan pelaksanaan kegiatan																
SUB KEGIATAN : PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA																		
2.	Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Melakukan koordinasi dengan atasan/pimpinan terkait pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana	Rp 45.000.000															
		2. Melakukan koordinasi ke basarnas untuk pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana																

[illegible]

[illegible]

SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEBENCANAAN											
6. Pengelolaan PUSDALOPS PB (Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana	1.	Membuat SK Pembentukan PUSDalops PB	Rp 40.000.000								
	2.	Memantau Pengumpulan data kejadian bencana									
	3.	Memantau Pengolahan data kejadian bencana									
	4.	Mengonsep laporan pelaksanaan kegiatan									
	5.	Melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan PUSDalops Penanggulangan Bencana ke BPBD Prov. Sul-Sel									

Benteng, 22 Januari 2024

MENGETAHUI :

KEPALA PELAKSANA BPBD,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.

NIP. 19700726 199101 1 002

KABID. KEKAMPUNGAN DAN LOGISTIK,

MUHAMMAD IKBAL, SE.

NIP : 19761019 201101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029

BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. SITI MARYAM, S.Pd., M.M
Jabatan : Penata Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD IKBAL, SE
Jabatan : Kabid. Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

MUHAMMAD IKBAL, S.E

Pihak Pertama,

Hj. SITI MARYAM, S.Pd., M.M

PERJANJIAN KINERJA
PENATA PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	bimtek peningkatan SDM TRC	Rp	Laporan
2		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	pertolongan dan evakuasi korban bencana	Rp	Laporan
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	fasilitasi penyediaan & pemberian bantuan logistik dan peralatan	Rp	Laporan
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	koordinasi dengan dinas terkait penanganan bencana	Rp	Laporan
				pertolongan dan evakuasi korban bencana	Rp	Laporan
3		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	pengelolaan PUSDALOPS PB (pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana)	Rp	Laporan

Benteng, 22 Januari 2024

PENATA PENANGGULANGAN BENCANA,

KABID. KEBURURATAN DAN LOGISTIK,

Hi. SITI MARYAM, S.Pd., M.M.
NIP. 19761019 201101 1 003

MUHAMMAD IQBAL, S.E.
NIP. 19761019 201101 1 003

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT		
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
SUB KEGIATAN				: PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) BENCANA KABUPATEN/KOTA														
1.	Bimtek Peningkatan SDM TRC	1. Mengarsipkan surat panggilan usulan peserta diklat pengembangan SDM TRC	Rp															
		2. Mengetik surat tugas pelaksanaan Bimtek																
		3. Mengikuti Bimtek Peningkatan SDM TRC																
		4. Mengetik Laporan pelaksanaan kegiatan																
SUB KEGIATAN				: PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA														
2.	Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Mendampingi Kabid. Kedaruratan dan Logistik untuk melakukan koordinasi ke basarnas dalam pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana	Rp															
		2. Menindaklanjuti arahan Kabid. Kedaruratan dan Logistik untuk menyampaikan kepada Tim TRC agar mengikuti briefing dengan dalam pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana																

SUB KEGIATAN		: AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA															
4. Koordinasi dengan lintas OPD dalam upaya penanganan bencana	1. Mengetik SK Pelaksanaan Kegiatan	Rp															
	2. Mendampingi atasan/pimpinan untuk melakukan koordinasi ke instansi terkait (Basarnas, PLN, TNI, POLRI, Tagana)																
	3. Mendokumentasikan pelaksanaan koordinasi ke instansi terkait (Basarnas, PLN, TNI, POLRI, TAGANA)																
	4. Mengetik laporan kejadian bencana																
5. Pertolongan dan evakuasi korban bencana	1. Ikut serta briefing dengan Tim TRC untuk pelaksanaan penanganan darurat bencana	Rp															
	2. Ikut serta dengan Tim TRC untuk melakukan penanganan darurat bencana, seperti penanganan pohon tumbang dll)																
	3. Mendokumentasikan kegiatan penanganan darurat bencana, seperti penanganan pohon tumbang dll)																
	4. Mengetik laporan pelaksanaan kegiatan																

SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEBENCANAAN													
6. Pengelolaan PUSDALOPS PB (Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana	1.	Mengetik SK Pembentukan Pusdalops PB	Rp										
	2.	Mengontrol Pengumpulan data dari setiap kejadian bencana											
	3.	Mengontrol Pengolahan data dari setiap kejadian bencana											
	4.	Mengetik laporan pelaksanaan kegiatan											
	5.	Mendampingi atasan/pimpinan untuk melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan Pusdalops Penanggulangan Bencana											

Benteng, 22 Januari 2024

PENATA PENANGGULANGAN BENCANA,

KABID KOPERATURAN DAN LOGISTIK,

MUHAMMAD IKBAL, S.E.

NIP. 19761019 201101 1 003

HJ. SITI MARYAM, S.Pd M.M.
NIP : 19681101 200701 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAWATI, S.Sos.

Jabatan : Penata Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD IKBAL, SE.

Jabatan : Kabid. Kedaruratan dan Logistik
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 26 Maret 2024

Pihak Kedua,

MUHAMMAD IKBAL, SE.

Pihak Pertama,

RAHMAWATI, S.Sos.

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PENATA PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
1	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Bimtek/Pelatihan peningkatan SDM TRC	Rp	Laporan
2	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Fasilitasi penyediaan dan pemberian bantuan logistik dan peralatan	Rp	Laporan

Benteng, 26 Maret 2024

KABID. KEPARURATAN DAN LOGISTIK,

PENATA PENANGGULANGAN BENCANA,

MUHAMMAD KBAL, S.E.
NIP : 19761019 201101 1 003

RAHMAWATI, S.Sos.
NIP : 19830614 202421 2 004

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSMAN, S.STP
Jabatan : Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.

Pihak Pertama,

RUSMAN S.STP

PERJANJIAN KINERJA
KABID. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
1	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	5 pemberian bantuan perbaikan rumah korban bencana (angin kencang, tertimpa pohon, kebakaran dll)	6 Rp 100.000.000	7 Laporan
				Monitoring dan Evaluasi penanganan pasca bencana		Laporan
				Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi		Laporan
Total					Rp 100.000.000	

Bonteng, 23 Februari 2024

KABID. REHABILITASI & REKONSTRUKSI

MENGETAHUI :

KEPALA PELAKSANA BPBD,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.
NIP : 19700726 199101 1 002

RUSMAN I.S.STP
NIP : 19810731 201206 1 003

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
KABID. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024**

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SUB KEGIATAN				: PENANGANAN PASCA BENCANA KABUPATEN/KOTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.	Pemberian bantuan perbaikan rumah korban bencana (angin kencang, tertimpa pohon, kebakaran dll)	1. Menginstruksikan kepada Pej. Fungs. untuk menindaklanjuti surat masuk permohonan bantuan perbaikan rumah korban bencana (proposal)	Rp 52.704.650																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

3.	Kordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	1. Melakukan koordinasi ke BNPB Pusat terkait dana hibah 2. Mengonsep laporan hasil koordinasi terkait dana hibah	Rp 41.570.000	
----	---	--	---------------	--

MENGETAHUI.

KEPALA PELAKSANA BPBD,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub
Nip : 19700726 199101 1 002

Benteng, 23 Februari 2024

KABID. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI,

RUSMAN, S.STP

Nip : 19940731 201206 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIQ. Z
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RUSMAN, S.STP
Jabatan : Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,

RUSMAN, S.STP

Pihak Pertama,

TAUFIQ. Z

PERJANJIAN KINERJA
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana	Pemberian bantuan perbaikan rumah korban Monitoring dan evaluasi penanganan pasca bencana	Rp	Laporan
					Rp	Laporan
				Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Rp	Laporan

KABID. REHABILITASI & REKONSTRUKSI,
Benteng, 23 Februari 2024
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN,


RUSMAN S. STP
NIP : 19910731 201206 1 003


TAUFIQ.
NIP. 19830124 201410 1 001

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT			
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES				
1.	Pemberian bantuan perbaikan rumah korban bencana (angin kencang, tertimpa pohon, kebakaran dll)	1. Mengetik SK tim pelaksanaan kegiatan	Rp																
		2. Menerima surat masuk permohonan bantuan perbaikan rumah (Proposal)																	
		3. Mengetik surat tugas untuk pelaksanaan kegiatan peninjauan dan assesment																	
		4. Mengetik format peninjauan dan assesment																	
		5. Mendokumentasikan kegiatan peninjauan dan assesment																	
		6. Mengetik laporan hasil peninjauan dan assesment																	
		7. Mengetik SK penerima bantuan																	
		8. Mengetik surat tugas kegiatan penyerahan bantuan																	
		9. Mendokumentasikan kegiatan penyerahan bantuan																	
		10. Mengarsipkan surat masuk permohonan bantuan (proposal)																	



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUSTINI, S.Sos.

Jabatan : Penata Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RUSMAN, S.STP

Jabatan : Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 26 Maret 2024

Pihak Kedua,


RUSMAN, S.STP

Pihak Pertama,


AGUSTINI, S.Sos.

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PENATA PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2024

SUB KEGIATAN : KOORDINASI PENANGANAN PASCA BENCANA KABUPATEN/KOTA

NO.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT		
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1.	Pemberian bantuan material bangunan untuk perbaikan rumah korban bencana (disebabkan oleh angin kencang, tertimpa pohon, kebakaran dll)	1 Mengetik surat tugas untuk pelaksanaan kegiatan peninjauan dan assesment	Rp -															
		2 menerima surat masuk permohonan bantuan perbaikan rumah (proposal)																
		3 Mengetik surat tugas untuk peninjauan dan assesment																
		4 Mengetik format peninjauan dan assesment																
		5 ikut serta Melaksanakan peninjauan dan assesment																
		6 Mengetik laporan hasil peninjauan dan assesment																
		7 Mengetik SK penerima bantuan																
		8. Mengetik surat tugas penyerahan bantuan																
		9. Ikut serta dalam Penyerahan bantuan																
		10. Mengetik laporan hasil pelaksanaan kegiatan																

KABID. REHABILITASI & REKONSTRUKSI,


RUSMAN S.STP
NIP. 19910731 201206 1 003

Benteng, 26 Maret 2024

PENATA PENANGGULANGAN BENCANA,



AGUSTINI, S.Sos.
NIP. 19980802 202421 2 006

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PENATA PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)
1.	Penanggulangan Bencana	1. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1. Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Pemberian bantuan perbaikan rumah korban bencana (angin kencang, tertimpa pohon, kebakaran dll)	Rp -	Laporan

Benteng, 26 Maret 2024.

KEPALA BIDANG REHABILITASI & REKONSTRUKSI,


RUSMAN S. STP
NIP. 19910731 201206 1 003

PENATA PENANGGULANGAN BENCANA,


AGUSTINI, S. Sos.
NIP. 19980802 202421 2 006

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :

1. semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian}}{\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}}} \times 100\%$$

2. semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian}}{\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}}} \times 100\%$$

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 yang telah disepakati Bersama, dalam hal ini antara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Bupati Kepulauan Selayar.

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 08/I/Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 3.1.
Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100
2.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100
3.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100

Berdasarkan tabel 3.1. diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 mencapai target 100 %.

Dalam laporan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing

kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan

Dalam dokumen Renstra Perubahan Tahun 2021 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024, hasil reuiu dan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah ditetapkan sebanyak 2 Program, 12 Kegiatan, dan sebanyak 34 Sub Kegiatan kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Program 1 terdiri dari 8 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan
- Program 2 terdiri dari 4 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisis capaian indikator outcome. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama (IKU).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berupaya melaksanakan tugas pokoknya dan fungsinya yaitu membantu Kepala Daerah (Bupati) dalam pengkoordinasian, fasilitasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.

Evaluasi dan analisis kerja yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun seluruh capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama dapat diuraikan dalam bentuk tabel yang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2 Indikator Kinerja BPBD Kab.Kep.Selayar

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100

Berdasarkan tabel 3.2 indikator kinerja diatas menunjukkan bahwa realisasi warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana mencapai 100%. Kegiatan pada layanan informasi rawan bencana terlaksana dengan optimal sesuai dengan jumlah alokasi anggaran yang termanfaatkan, pencapaian target disini dapat diartikan bahwa target yang dicapai disesuaikan dengan alokasi sumber daya keuangan/anggaran yang diberikan. Adapun kegiatan yang kami laksanakan dari pelayanan informasi rawan bencana berupa : (1) Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota dan (2) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota.

Tabel 3.3 Indikator Kinerja BPBD Kab.Kep.Selayar

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100

Berdasarkan tabel 3.3 indikator kinerja diatas menunjukkan bahwa realisasi warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mencapai target 100 %. Kegiatan pada pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana terlaksana dengan optimal sesuai dengan jumlah alokasi anggaran yang termanfaatkan, pencapaian target disini dapat diartikan bahwa target yang dicapai disesuaikan dengan alokasi sumber daya keuangan/anggaran yang diberikan, namun apabila masih diberikan anggaran tambahan yang lebih memadai maka kegiatan-kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya yang dapat mendukung layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dapat terlaksana, seperti contoh pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan pada SDM Kebencanaan/relawan bencana dapat masih sangat perlu ditingkatkan kapasitasnya, serta kegiatan gladi kesiapsiagaan yang dapat meningkatkan wawasan dan kapasitas khususnya yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana agar dapat mengenali dan memahami lingkungan sekitarnya dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Tabel 3.4 Indikator Kinerja BPBD Kab.Kep.Selayar

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100

Berdasarkan tabel 3.4 indikator kinerja diatas menunjukkan bahwa realisasi warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana mencapai target 100%. Kegiatan pada layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana terlaksana dengan optimal sesuai dengan jumlah alokasi

anggaran yang dimanfaatkan, pencapaian target disini dapat diartikan bahwa target yang dicapai disesuaikan dengan alokasi sumber daya keuangan/anggaran yang diberikan, namun pada kondisi pada saat ini sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban masih kurang memadai dikarenakan masih kurangnya kendaraan operasional (mobil rescue) dan kurang optimalnya kondisi kendaraan yang berfungsi sebagai mobilisasi penanganan darurat bencana di wilayah yang terdampak bencana.

C. REALISASI KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, dilakukan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas; dan
4. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2023 sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003. Tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD), dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pada tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan 2 Program, 12 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.4.581.062.000,- (Empat milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

Adapun Realisasi keuangan Tahun 2024 sebesar Rp.4.420.517.985,- (Empat milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) termasuk belanja gaji pegawai (Realisasi 96,50%).

Berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2024 dan dibandingkan dengan Perjanjian dan Penetapan Kinerja tahun 2024, maka Capaian Kinerja Badan Peanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	7.900.000,-	7.861.900,-	
Output	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	99,52%	

Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	5.872.000,-	5.835.200,-	
Output	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	99,37%	

Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	5.872.000,-	5.800.400,-	
Output	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	98,78 %	

Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	5.872.000,-	5.806.800,-	
Output	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	98,89 %	

Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	5.872.000,-	5.758.200,-	
Output	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	

Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	98,06%	
---------	---	------	--------	--

Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	7.750.000,-	7.619.500,-	
Output	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	98,32 %	

Evaluasi kinerja perangkat daerah

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	12.694.000,-	12.675.200,-	
Output	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	4 Laporan	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	99,85 %	

2. Administrasi keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	2.048.862.000,-	1.903.463.504,-	
Output	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	
Outcome	Persentase pengembangan sistem pelaporan keuangan	100%	92,90 %	

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	14.342.000,-	14.282.500,-	
Output	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	
Outcome	Persentase pengembangan sistem pelaporan keuangan	100%	99,59 %	

Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	7.308.000,-	7.229.000,-	
Output	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	
Outcom	Persentase pengembangan sistem pelaporan keuangan	100%	98,92%	

3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	5.000.000,-	4.254.300,-	
Output	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	
Outcome	Persentase Administrasi barang milik daerah yang tersedia	100 %	85,09%	

4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah

Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	123.706.000,-	123.687.925,-	
Output	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang	7 orang	
Outcome	Persentase peningkatan kompetensi teknis pegawai	100 %	99,99 %	

5. Administrasi umum perangkat daerah

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	6.401.000,-	6.399.800,-	
Output	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	
Outcome	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dapat dipenuhi	100 %	99,98 %	

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	16.032.700,-	16.032.700,-	
Output	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	
Outcome	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dapat dipenuhi	100 %	100%	

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	5.000.000,-	5.000.000,-	
Output	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	
Outcome	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dapat dipenuhi	100 %	100%	

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	467.053.500,-	466.998.720,-	
Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	
Outcome	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dapat dipenuhi	100 %	99,99 %	

6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Pengadaan Mebel				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	44.018.000,-	36.748.000,-	
Output	Jumlah paket mabel yang di sediakan	40 unit	40 unit	
Outcome	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	83,48 %	

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	30.500.000,-	30.087.000,-	
Output	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 unit	3 unit	
Outcome	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	98,65 %	

7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	111.020.000,-	110.713.248,-	
Output	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	

Outcome	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	99,72%	
---------	---	-------	--------	--

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	338.497.100,-	337.562.800,-	
Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	
Outcome	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	99,72 %	

8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	40.130.000,-	40.044.900,-	
Output	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	99,79%	

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	137.870.000,-	136.685.340,-	
Output	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinanya	23 unit	23 unit	
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	99,14%	

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	31.030.000,-	31.030.000,-	
Output	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	20 Unit	20 unit	
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100%	100 %	

Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	59.580.000,-	59.580.000,-	
Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100%	100 %	

B. Program penanggulangan bencana**1. Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten / kota**

Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten / kota (per jenis bencana)				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	90.985.000,-	90.826.400,-	
Output	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 Tahun	100 Orang	100 Orang	
Outcome	Persentase penanganan korban darurat bencana	100 %	99,83%	

2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	102.655.000,-	100.672.800,-	
Output	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	2 Kawasan	2 Kawasan	
Outcome	Persentase penanganan korban darurat bencana	100%	98,07%	

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	35.000.000,-	34.763.184,-	
Output	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas teknis dan manajerialnya	5 orang	5 orang	
Outcome	Persentase penanganan korban darurat bencana	100%	99,32%	

Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/kota				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	156.354.000,-	156.308.132,-	
Output	Jumlah Kegiatan Penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) kabupaten/kota yang tertangani	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
Outcome	Persentase penanganan korban darurat bencana	100%	99,97%	

3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Respon cepat penanganan darurat bencana kabupaten / kota				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	10.100.000,-	9.955.300,-	
Output	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	99,55 %	

Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	37.490.000,-	36.984.900,-	
Output	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	30 orang	30 Orang	
Outcome	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	98,65%	

Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten / Kota				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	98.456.000,-	98.323.500,-	
Output	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	30 Orang	30 Orang	
Outcome	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	99,87%	

Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	221.939.300,-	221.781.932,-	
Output	Jumlah laporan pelaksanaan Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	
Outcome	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	99,93%	

4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	40.000.000,-	39.914.500,-	
Output	Jumlah data dan informasi kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanganan Bencana	100%	99,79%	

Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	250.000.000,-	249.830.400,-	
Output	Jumlah Penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
Outcome	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanganan Bencana	100%	99,93%	

BAB IV

PENUTUP

Sebagai lembaga yang sudah berdiri selama kurang lebih 14 (Empat Belas) tahun, eksistensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengemban tugas sebagai pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana disadari belum memberikan arti yang signifikan, dibanding dengan beban dan tanggung jawab dalam mengantisipasi, mengurangi, dan melaksanakan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hal ini antara lain dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran dalam membiayai berbagai permasalahan mulai prabencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana, dan faktor SDM yang ada, sarana dan prasarana operasional kebencanaan yang belum memadai baik pada tingkat kelembagaan daerah maupun masyarakat.

Selain itu, urusan penanganan bencana sebelum terbentuknya BPBD di masa lalu, sepenuhnya ditangani dan atau dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat, sehingga pemerintah daerah terutama institusi yang ada belum cukup berpengalaman dalam memahami dan mengejawantahkan secara optimal pelaksanaan urusan di Bidang Penanggulangan Bencana.

Oleh karena itu, penanggulangan bencana pada tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, seyogyanya bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah semata, namun juga dituntut adanya kesadaran dan peran serta dari segenap stakeholders yang ada dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi salah satu perwujudan dari akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.